KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : mau ganti gorden rp 48m DPR di-bully
**Tanggal** : Minggu, 27 Maret 2022
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 1

# Mau Ganti Gorden Rp 48 M

# DPR Di-bully

**Ada berita menjengkelkan meluncur dari Gedung Wakil Rakyat. Setjen DPR berencana membeli gorden seharga Rp 48,7 miliar. Meski pengadaan pemanis ruangan itu, baru rencana, DPR langsung di-*bully* rame-rame. Para wakil rakyat itu, dianggap kok tega menghamburkan duit di saat rakyat sedang kesusahan akibat pandemi.**

INFORMASI pengadaan gorden ini terungkap dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR yang beralamat di: *lpse.dpr.go.id*. Saat dilihat *Rakyat Merdeka* tadi malam, pengadaan gorden ini berkode 732087 dengan nama paket "Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata". Blind adalah jenis tirai jendela yang bisa dikontrol.

Dari informasi tender itu, pengadaan tender dibuat 8 Maret 2022. Tahap tender saat ini sampai evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga.

Gorden ini sepertinya akan dipasang di perumahan DPR, Kalibata, Jakarta. Soalnya, dalam situs itu disebutkan lokasi pengerjaan beralamat di Jalan DPR Dalam No.12, RT 12/RW 5, Rajawati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ada 49 perusahaan yang ikut tender pengadaan gorden ini. Rincian peserta tender ada dalam situs tersebut.

Berapa nilai proyeknya? Untuk pengadaan gorden ini, DPR menganggarkan dari APBN 2022 dengan pagu Rp 48,7 miliar.

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

# Soal Pengadaan Gorden, Dasco Akan Langsung Cek Ke Sekjen DPR

**DPR Di-bully**

... DARI HALAMAN 1

Sampai kemarin, Sekjen DPR Indra Iskandar belum memberikan komentar mengenai pengadaan gorden senilai Rp 48,7 miliar ini.

Sementara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu menahu dengan pengadaan gorden tersebut. Kata dia, usulan pengadaan gorden itu bukan dari anggota, tapi dari Kesekjenan DPR. Politisi Gerindra ini justru mengaku baru mengetahui informasi ini dari media.

"Nanti akan kita cek lagi kepada Sekjen DPR untuk kita konfirmasi," kata Dasco, kepada wartawan, kemarin.

Apakah tidak berlebihan anggaran sebesar itu untuk membeli gorden? Soal pantas tidak pantas, Dasco mengaku belum bisa menilai. Ia perlu mengecek lebih dulu pengadaan gorden tersebut secara detail.

"Saya baru baca beritanya. Kalau saya ngomong nggak pantas tapi ternyata keperluan gordennya memang banyak, kan repot. Jadi, jangan saya suruh ngomong sesuatu yang belum saya cek kebenarannya," ujarnya.

Dasco kembali menegaskan, perencanaan pengadaan kebutuhan barang di DPR tidak dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses pengadaan dan penganggaran sepenuhnya disusun oleh pihak Sekretariat DPR.

"Kita nggak ikut campur. Itu bukan usulan anggota dewan dan memang anggota dewan tidak berhak mengusulkan. Itu kewenangan Kesekjenan selaku pemegang kuasa anggaran," katanya.

Kabar DPR akan membeli gorden senilai Rp 48,7 miliar ini, bikin jagat Twitter panas. Mereka melayangkan kritik dan sindiran, juga *bully*-an. Mereka menilai, DPR tak peka dengan keadaan.

Akun *@Ayusihh* menyebut, saat ini, rakyat sedang kesulitan akibat kenaikan harga sembako, terutama minyak goreng. Mereka yang jadi wakil rakyat kok malah menggunakan uang rakyatnya bukan untuk kebutuhan primer. "Sudah matikah hati nurani mereka?" tanyanya.

Akun *@meneerrwno69* ikut geleng-geleng kepala. Ia tak menyangka DPR lebih mementingkan urusan tersier atau yang bersifat mewah-mewah. "Apa gak sebaiknya bantu masyarakat termasuk memenuhi kebutuhan pokoknya," ujarnya.

"Sepakat. Masih banyak urusan rakyat yang terabaikan. Mending duitnya untuk subsidi minyak goreng daripada beli gorden," timpal *@moja_c*. "Tanpa gorden baru masih bisa kerja kan," ujar *@tony172*.

Akun *@assyafisri* mengaku tak habis pikir dengan jalan pikiran DPR. "Sepenting itu kah ganti gorden di saat sekarang?" ujarnya. Menurut *@jumpyminded*, sebaiknya gorden DPR ganti dengan spanduk partai. "Kan bagus jadi meriah," sindirnya.

Akun *@edhi_shi* menilai harga Rp 48 miliar untuk gorden terlalu fantastis. "Harganya kurang masuk akal," sentilnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, urusan pengadaan di DPR itu selalu membuat rakyat elus dada. Selain fantastis dananya, manfaatnya juga tidak jelas. Alasan yang dipakai pun sekadarnya, tapi efek dana dari pengadaan itu, bukan main besarnya.

Selain fantastis, argumen seadanya juga biasanya bersifat tertutup. Publik baru diberi tahu setelah masuk di ujung tender. Itupun sepenggal info.

"Itulah yang terjadi pada pengadaan gorden ini. Harganya selangit, tapi kualifikasi, jenis, bahan, dan kuantitasnya, tidak ada yang tahu," kata Ray, saat dikontak, tadi malam.

Kata dia, saat informasi pengadaan seperti ini heboh, mulailah tik-tokan antara Sekjen, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pimpinan DPR. Yang satu menyebut tidak tahu, yang lain merasa tidak memiliki kewenangan, dan tentu ada pihak yang merasa bahwa semua pemangku kewenangan di DPR sudah diberitahu.

"Nanti, setelah pertanyaan publik meredup, rencana pengadaan akan jalan terus," ujarnya.

Menurut Ray, DPR kurang peka dengan kritik publik. Karena bukan kali ini saja terjadi. Dan meski sudah dikritik berkali-kali, cara seperti ini terus berulang. ■ BCG